

**Judul** : DPR RI Desak Kemenkes Pastikan Layanan Kesehatan Optimal  
**Tanggal** : Rabu, 15 Februari 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

## DPR RI Desak Kemenkes Pastikan Layanan Kesehatan Optimal

WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI Nihayatul Wafiroh geram dengan kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini karena selama 2022 kinerja kementerian tersebut dapat dikategorikan sangat lamban dalam kinerja dan performa.

Oleh karena itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mendesak Kemenkes untuk segera memperbaiki performa kinerja dan memastikan agar pelayanan kesehatan berjalan secara optimal.

Kegeraman Nihayatul bukan tanpa dasar. Menurut dia, pada 2023 ini banyak persoalan kesehatan yang dihadapi di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah harus siap menghadapi berbagai persoalan tersebut.

"Akhir Januari kemarin, kita mengevaluasi kinerja Kemenkes tahun 2022. Kami Raker sampai empat hari hingga larut malam. Kita, di Komisi IX DPR RI perlu mengetahui apakah Kemenkes beserta jajarannya bekerja dengan baik. Sekali lagi, kami ingin memastikan setiap Warga Negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik di 2023. Karena memang sudah menjadi kewajiban negara," kata Nihayatul, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Perlu diketahui, Komisi IX DPR RI mengadakan Raker dengan Kemenkes selama empat hari tiga malam berturut-turut pada 24-26 Januari 2023. Raker ini membahas seluruh rangkaian pelaksanaan program Kemenkes sepanjang tahun 2022.

Banyak program Kemenkes yang tidak sesuai dengan capaian target telah ditetapkan. Capaian beberapa program dan rendahnya serapan anggaran menjadi catatan Komisi IX DPR RI.

Dalam sesi pendalaman, ba-



DOK: DPR RI

nyak anggota yang menyoroti buruknya pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), penanganan pada pasien gagal ginjal, kualitas PMT, pelaksanaan BIAN dan BIAS, dan lain sebagainya.

Dalam Raker tersebut, Nihayatul Wafiroh, politisi dari daerah pemilihan (dapil) Jatim III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) mengkritisi berbagai kinerja yang telah dilakukan Kemenkes. Dua di antaranya yaitu terkait pengadaan USG di puskesmas-puskesmas serta program Jampersal.

"Dari hasil kunjungan ke berbagai daerah kita mendapatkan masih banyak Puskesmas yang tidak mendapatkan USG. Padahal mereka sangat membutuhkan. Anggaran juga masih tersedia. Kenapa Kemenkes tidak melakukan pengadaan itu? Padahal USG sangat penting untuk memastikan kesehatan janin dan juga untuk memastikan kebutuhan kesehatan perempuan hamil," jelasnya.

Menurutnya, Puskesmas adalah tempat rujukan yang utama. Puskesmas sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, selain peningkatan kualitas di setiap FKTP, azas pemerataan dan keadilan harus benar-benar dijalankan Pemerintah.

"Masak anggaran sudah disediakan malah tidak dipakai. Ini kan menunjukkan buruknya kinerja Kemenkes,"

tambah Nihayatul.

Selain itu, untuk program Jampersal, implementasinya bahkan tidak ada 10% dari yang direncanakan. Dari anggaran Rp350 miliar, Kemenkes hanya menyerap sebesar Rp9 miliar. Padahal jaminan persalinan ini sangat dibutuhkan untuk perempuan miskin yang tidak masuk dalam JKN.

Nihayatul Wafiroh yang juga Koordinator Nasional Gerakan Peduli Anak dan Perempuan ini sangat menyayangkan rendahnya serapan anggaran tersebut. Ia menerangkan, seharusnya jika Kemenkes kerjanya optimal, angka kematian Ibu pada 2022 yang diperkirakan 3.000 orang itu bisa ditekan.

"Ini kan miris. Anggaran sudah diketok, rakyat juga butuh, tapi enggak dipakai. Fatal akibatnya. Ingat, Kesehatan ini hak utama warga yang harus dipenuhi Negara dan Kemenkes yang menjadi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kesehatan. Jadi, kalau dari anggaran sebesar Rp350 miliar dan yang terpakai hanya Rp9 miliar, itu artinya kinerja Kemenkes yang bermasalah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nihayah berharap Kemenkes akan benar-benar memperbaiki kinerjanya di tahun 2023. "Kita akan terus mengupayakan agar kebutuhan kesehatan terpenuhi. Syaratnya, Kemen-

kes benar-benar bekerja lebih cepat, lebih cekatan. Jangan nunggu laporan terus. Jadi harus lebih bagus di tahun 2023 ini," pungkasnya.

### Harus ditingkatkan

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan baik diterima oleh peserta JKN, dokter, dan fasilitas pelayanan kesehatan, setelah kenaikan tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemenkes sebelumnya telah menaikkan tarif pelayanan kesehatan peserta JKN. Perubahan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

"Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus berkomitmen memastikan dan mengawasi implementasi dari tujuan kenaikan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar politisi yang biasa disapa Cak Imin ini.

Di sisi lain, Cak Imin juga mendorong Kemenkes untuk terus berkomitmen dalam upaya mengoptimalkan transformasi sistem kesehatan nasional 2023-2024 yang di dalamnya terdapat enam indikator prioritas. Keenam indikator tersebut adalah transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan, sebab transformasi sistem kesehatan nasional tersebut sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan pada program JKN. "Perbaikan layanan kesehatan secara menyeluruh harus menjadi prioritas," tutupnya. (RO/OL-10)